BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini perkembangan pembangunan di Indonesia mengalami banyak peningkatan dalam segala aspek yang terasa signifikan. Salah satunya dalam bidang perekonomian dan perindustrian. Peningkatan pembangunan dalam bidang ekonomi dan industri tidak terlepas dari peranan pihak – pihak perusahaan yang berada di Indonesia. Baik besar maupun kecil menengah atau UMKM menunjang kemajuan pembangunan ekonomi dan industri dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. UMKM mampu untuk menjadi kekuatan utama perekonomian, karena jumlahnya yang sangat banyak jika dibandingkan dengan perusahaan besar.(kemenkeu.go.id, 2021)

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Mandiri Institute, per April 2021 ada sekitar 84,8 persen UMKM yang beroperasi. Jumlah tersebut meninkat dibandingkan saat terjadi pandemi sepanjang tahun 2020 dimana hanya 69,7 persen UMKM yang beroperasi.(merdeka.com)

UMKM dahulu kala dilakukan semata mata hanya untuk menyambung

hidup pelaku UMKM tersebut dan tidak dibiayai oleh pihak eksternal atau perbankan tetapi dengan seiring berjalannya waktu UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain selain pemilik usaha tersebut juga mulai berani mengambil pinjaman modal dari luar atau perbankan utuk memulai usahanya. Selain mengurangi pengangguran, UMKM juga menimbulkan dampak yang cukup bagus bagi perekonomian negara. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat secara terus menerus, bahkan mampu menyerap 85juta hingga 107 jura tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99 persen. Sisanya sekitar 0.01 persen atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data bersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan karena sekitar 60-70% pelaku UMK belum memiliki akses pembiayaan perbankan (bi.go.id,2015)

Pada saat banyaknya perusahaan besar yang tutup karena merugi sementara pelaku UMKM tetap bisa berjalan yang terjadi dikarenakan tingkat resiko lebih kecil dan jarangnya UMKM yang bergelut dengan dunia perbankan. Bahkan pada saat setelah krisis moneter yang terjadi, para pengusaha mikro kecil dan menengah ini cenderung lebih berkembang.

Perkebangan UMKM diberi perhatian yang sangat besar oleh pihak pemerintah Indonesia. Keberhasian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan juga menunjang pembangunan

perekonomian negeri. UMKM mewakili jumlah kelompok usaha besar. Dimana salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Indonesia kepada pelaku UMKM adalah dengan adanya landasan hukum yang tertuang pada UU No. 20 Tahun 2008 yang memuat tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dengan ada dan diberlakukannya undang undang tentang usaha mikro kecil dan menengah maka pelaku usaha ini akan mendapatkan jaminan dan keadilan usaha juga dengan adanya undang-undang ini potensi, peran dan kedudukan UMKM dalam mewujudkan tujuan ekonomi negara seperti mengurangi angka kemiskinan, meningkatan lapangan pekerjaan yang berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan perkapita pada masyarakat Indonesia. Selain itu pemerintah juga banyak menyuguhkan banyak program dalam bidang permodalan pada usaha ini, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa didapatkan pada bank–bank tertentu Seperti Bank Jatim dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga beberapa badan penyedia modal dainnya. Alasan UMKM tidak menggunakan dana atau modal dari pemberi kredit yaitu pelaku usaha baru membuka usahanya dan ukuran usaha yang masih kecil. Alasan lain yang sering terlintas dalam pemikiran masyarakat adalah rumitnya proses serta syarat yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman modal.

Agar dapat mengakses bank dengan mudah, maka UMKM harus membuat laporan keuangan. Akan tetapi, keadaan dilapangan menunjukan sebagian besar dari pelaku usaha kecil menengah tidak membuat laporan keuangan bagi pemberi modal (dalam hal ini adalah

bank) sehingga membuat pihak bank sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman.

Rudiantoro dan Siregar (2012) juga menyebutkan bahwa salah satu teknik pemberian kredit yang paling banyak digunakan adalah financial statement lending yang mendasarkan pemberian kreditnya atas informasi keuangan dari debiturnya. Apabila dilihat dari sisi lain hal tersebut menjadi kendala tersendiri, sebab UMKM ternyata tidak mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh bank tersebut. Padahal tidak semua pelaku UMKM paham terkait standar akuntansi keuangan yang seharusnya dijadikan sebagai pijakan untuk membuat laporan keuangan

Demi terpenuhinya kebutuhan informasi bagi UMKM maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) ketika tahun 2009 menyusun dan mensahkan Standar yang diadopsi dari International Financial Reporting Standard for Small Medium Enterprises (IFRS for SMEs) yang lebih sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP). Namun mulai saat disahkan hingga sekarang masih menunjukkan belum maksimal pengimplementasian SAK ETAP yang oleh para pelaku usaha. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kurangnya informasi yang menghasilkan rendahnya motivasi untuk menerapkan pelaporan sesuai standar akuntansi. Terkait dengan hal tersebut untuk membantu EMKM untuk dapat menyajikan laporan keuangan, DSAK IAI pada tanggal 24 Oktober 2016 menyusun dan mensahkan exposure draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berisikan konsep yang tidak terlalu rumit atau dapat

dikatakan sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. Penyusunan dan pembuatan SAK EMKM didasarkan pada UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Standar ini diterbitkan dengan harapan dapat membantu UMKM untuk dapat menerapkan akuntansi sesuai standar yang selama ini masih dianggap rumit jika menggunakan SAK ETAP. Penggunaan SAK EMKM ini ditujukan untuk pengguna eksternal entitas mikro, kecil dan menengah seperti pemilik yang tidak terjun langsung dalam pengelolaan usaha dan kreditur, dimana penggunaan laporan keuangan pada UMKM cenderung tidak membutuhkan laporan keuangan rumit dan analisis laporan keuangan secara mendalam.

Dalam hal ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan sebuah standar baru dalam penyusunan laporan keuangan untuk UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang resmi diberlakukan efektif 1 Januari 2018. Standar yang baru ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM, 2016). Diharapkan entitas mikro, kecil dan menengah bisa menerima dan siap untuk menggunakan peraturan yang baru ini

Dalam menjalankan bisnis, pelaku UMKM tidak semata mata lancar dan tidak ada hambatan atau tantangan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian dari Hotijah (2019) dalam penyusunan laporan keuangan beraneka ragam hambatan yang dilalui pelaku UMKM, diantaranya kurangnya pengetahuan yang mereka miliki terhadap akuntansi juga pihak UMKM merasa belum membutuhkan pencatatan pencatatan keuangan yang detail, selain itu belum ada sumber daya

manusia (SDM) yang komperten di bidang akuntansi. Faktor lain yang menjadi penghambat pada pelaku UMKM yaitu tidak ada pemisahan antara keuangan khusus usaha dengan keuangan pribadi..

Salah satu kendala dan yang paling banyak terjadi dalam UMKM adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik sejatinya adalah salah satu faktor kunci yang akan berdampak pada kemajuan dan kemunduran UMKM. Salah satu cara untuk mengatasi masalah pengelolaan keuangan pada UMKM adalah dengan menghadirkan ilmu akuntansi yang baik dan benar sesuai standar dalam suatu usaha tersebut. Hadirnya ilmu akuntansi dalam kegiatan suatu usaha dapat memberikan banyak informasi mengenai keuangan usaha dan hal –hal penting lainnya dalam menjalankan usaha.

Informasi yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha itu adalah antara lain penghitungan pajak yang harus dibayarkan, posisi dana usaha, pengeluaran dan pemasukan kas juga kinerja dari usaha mikro kecil menengah. Dalam UMKM metode akuntansi yang digunakan pada umumnya yaitu metode kas, dimana pendapatan dan beban diakui saat kas diterima ataupun dikeluarkan.

Kenyataan ini amat menarik dikaji karena walaupun dengan adanya SAK EMKM untuk mempermudah UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan, tapi dalam implementasinya pencatatan keuangan yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha UMKM masih jauh dari standar yang ditetapkan. Penulis menganggap perlu untuk mengkaji masalah yang timbul dikalangan UMKM berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan seharusnya menjadi kebutuhan bagi

setiap unit usaha, terutama bagi pemilik usaha, mengingat manfaat yang dapat diperoleh bagi keberlanjutan usaha itu sendiri

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis ingin mengetahui tingkat pemahaman dan penerapan SAK EMKM dalam UMKM dan penulis mengambil judul penelitian **"Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (studi pada UMKM Onde-onde "ARASA" di Kota Mojokerto)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini yang dapat diambil darilatar belakang diatas, adalah :

1. Bagaimana pemahaman UMKM produksi onde-onde ARASA Kota Mojokertomengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) ?
2. Bagaimana penerapan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM produksi onde-onde ARASA Kota Mojokerto ? Apakah sudah sesuaidengan SAK EMKM?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha produksi onde- onde ARASA dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemahaman pelaku usaha produksi onde- onde

ARASA terhadap laporan keuangan yang mengacu pada SAK EMKM.

2. Untuk menganalisis seperti apa penerapan pencatatan laporan keuangan onde-onde ARASA dan sudah sama dengan SAK EMKM atau belum.
3. Untuk menganalisis apasaja kendala - kendala yang dihadapi pelaku usaha onde-onde ARASA dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang akan didapat dalam penelitian adalah sebagai berikut ini adalah :

1. Bagi pihak peneiti, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM dalam UMKM.
2. Bagi pihak onde-onde "ARASA" Mojokerto, memberikan masukan bagi manajemen perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan yang tepat guna memperbaiki penerapan pencatatan keuangan.
3. Bagi pihak lain, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi pihak lain adalah sebagai bahan acuan yang akan melanjutkan atau membuat penelitian yang sesuai dengan judul skripsi ini.